

**DAMPAK SOSIAL EKONOMI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN**

LAPORAN PENELITIAN



Oleh:
SETIA MULYAWAN
NIP. 19710620 200801 1010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
2015

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang atas limpahan berkah dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan penelitian dengan judul Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Infrastruktur Jalan ini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

- 1) Yang terhormat Bapak **Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, MS.**, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta seluruh jajaran pimpinan dan staf, atas kesempatan yang diberikan;
- 2) Yang terhormat Bapak **Herry Sutanto, SE., MM.**, dan Bapak **Chaerul Saleh, S.Ag., M.Ag.** selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Manajemen, yang telah memberikan kesempatan dan dukungannya.
- 3) Rekan-rekan sejawat, Dosen Program Studi Manajemen khususnya, dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum pada umumnya, atas dukungan, saran, dan masukannya.

Akhirnya, saya berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik bagi kepentingan akademik maupun bagi kepentingan praktis, khususnya yang berkaitan dengan disiplin ilmu manajemen. Saya menyadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu saya juga mengharapkan kritik, saran, dan masukan dari berbagai pihak guna perbaikan penelitian lanjutan pada masa yang akan datang.

Bandung, April 2015

Setia Mulyawan
NIP. 150409413

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Bab I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. TUJUAN.....	4
1.3. KELUARAN (<i>OUTPUT</i>).....	4
1.4. KEGUNAAN PENELITIAN.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. KONSEPSI PEMBANGUNAN.....	6
2.2. KRITERIA DAN PENDEKATAN PEMBANGUNAN	9
2.3. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR EKONOMI.....	13
2.4. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN...	14
2.5. STRATEGI PEMBANGUNAN DAN PERUBAHAN MASYARAKAT.....	17
2.6. DAMPAK PEMBANGUNAN JALAN TOL.....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	26
3.1. METODE	26
3.2. KERANGKA PEMIKIRAN.....	26
3.3. ALUR KEGIATAN.....	28
3.4. SUMBER DAN METODE ANALISIS DATA.....	29
3.5. METODE PENETAPAN INDIKATOR.....	30
3.6. INDIKATOR DAMPAK.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	34
4.1.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah.....	34
4.1.2. Hidrologi dan Klimatologi.....	40
4.1.3. Keadaan Sosial Ekonomi.....	52
4.2. ANALISIS DAMPAK SOSIAL - EKONOMI	61
4.2.1. Dampak Sosial	62
4.2.2. Dampak Ekonomi	63
4.3. PENANGGULANGAN DAMPAK.....	65
4.3.1. Penanggulangan Dampak Sosial.....	65
4.3.2. Penanggulangan Dampak Ekonomi	70
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	79
5.1. KESIMPULAN.....	79
5.2. REKOMENDASI	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Jalan, baik jalan tol ataupun jalan raya adalah suatu sarana yang penting yang menunjang kehidupan manusia dan aktivitasnya yang juga menjadi tolak ukur dalam pembangunan suatu daerah bahkan Negara. Jalan tol merupakan sarana yang wajib disediakan oleh pemerintah. Dasar hukum jalan tol yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004, jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jalan tol diselenggarakan antara lain adalah untuk memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang dan meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Demikian halnya dengan pembangunan jalan tol Cisumdawu yang tahap awal pembangunannya dimulai tahun 2012, akan memberikan peran penting dalam pembangunan di Kabupaten Sumedang. Dengan dibangunnya jalan tol Cisumdawu dapat mengurangi tingkat kemacetan jalur Sumedang-Bandung dan sebaliknya, disamping itu juga dapat mengurangi beban jalan Cadas Pangeran yang rawan longsor. Selain itu pembangunan jalan tol Cisumdawu juga memberikan dampak negatif antara lain dibidang pertanian akan mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian seluas kurang lebih 750 Ha dan akan berkurangnya konsumen rumah makan–rumah makan yang berada di sepanjang jalan Jatinangor-Dawuan, yang selama ini sering disinggahi oleh truk-truk barang atau mobil keluarga yang melewati jalur tersebut. Dengan demikian untuk

mengantisipasi dampak negatif terhadap sosial ekonomi masyarakat, yang akan timbul dari pembangunan jalan tol Cisumdawu ini dan agar dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumedang maka perlu dibuat perencanaan yang baik agar dampak negatif tersebut dapat diantisipasi dari awal.

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu proses perbaikan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berlangsung terus menerus menuju keadaan yang lebih baik. Tujuan pembangunan ini adalah kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan pembangunan itu sendiri. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tersebut, diperlukan sarana dan prasarana penunjang, termasuk di dalamnya adalah prasarana transportasi. Pertumbuhan perekonomian nasional yang terus meningkat harus diikuti dengan penyediaan infrastruktur jalan. Pembangunan jalan tol merupakan sistem transportasi yang diperlukan untuk mendorong kelancaran arus barang dan jasa, serta sebagai alat pemersatu maupun untuk mempermudah pengamanan ketahanan pangan suatu wilayah.

Keberadaan prasarana transportasi sangatlah vital dalam menunjang keberhasilan pembangunan suatu negara. Prasarana tersebut menjadi pendorong bagi berputarnya roda perdagangan dan industri, dua hal yang menjadi inti dalam pembangunan bidang ekonomi. Pembangunan jalan tol, sebagai salah satu bentuk prasarana transportasi, merupakan salah satu prioritas utama Departemen Pekerjaan Umum (PU). Saat ini kapasitas jalan tol di Pulau Jawa tidak sebanding dengan perkembangan jumlah dan mobilitas penduduk.

Kabupaten Sumedang merupakan daerah yang akan dikembangkan sarana transportasinya melalui pembangunan jalan tol Cisumdawu. Menyikapi

rencana ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sangat memahami arti penting dan nilai strategis pembangunan jalan tol ini, saat ini Kabupaten Sumedang telah menjadi kota penyangga bagi ibukota Propinsi Jawa Barat. Sebagai Konsekwensi logisnya adalah meningkatnya tingkat kepadatan lalu lintas, sehingga pembangunan jalan tol Cisumdawu adalah sebuah rencana final dan tidak bias ditawar-tawar lagi.

Pembangunan jalan tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) sepanjang 60,11 Km merupakan upaya Pemerintah Pusat dan Propinsi Jawa Barat untuk pengembangan wilayah Jawa Barat bagian tengah dan timur, khususnya mendukung PKN Cirebon (Wilayah Jawa Barat bagian Tengah dan Timur, rencana pembanguan Pelabuhan Cirebon dan Bandara Internasional (Kertajati di Majalengka), terbagi dalam 6 (enam) segmen yaitu: Cileunyi–Tanjungsari: 9,80 Km, Tanjungsari–Sumedang: 17,51 Km, Sumedang-Cimalaka: 3,73 Km, Cimalaka-Legok: 6,96 Km, Legok-Ujungjaya: 16,35 Km, dan Ujungjaya-Kertajati: 4,00 Km.

Salah satu dampak positif jalan tol diharapkan mampu meningkatkan gairah perekonomian di Kabupaten Sumedang yang pada akhirnya akan mendorong kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pembangunan ini juga tidak menutup kemungkinan munculnya beberapa dampak lain yang justru negatif, seperti berkurangnya aktivitas bisnis masyarakat yang selama ini tergantung pada mobilitas transportasi. Dampak ini muncul karena pembangunan jalan tol akan mengalihkan arus mobilitas masyarakat, sehingga sektor-sektor usaha tertentu yang berada pada jalur transportasi eksisting menjadi terancam. Untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya nampak ini, maka perlu dilakukan kajian yang diarahkan untuk mengetahui dampak sosial ekonomi pembangunan jalan tol Cisumdawu. Hasil kajian ini diharapkan akan memberikan rekomendasi

bagi penyusunan strategi pembangunan daerah guna meminimalisir dampak negatif dari pembangunan jalan tol tersebut.

1.2. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan penelitian dampak sosial ekonomi pembangunan jalan tol Cisumdawu ini adalah:

- 1) Mengkaji dampak sosial ekonomi pembangunan jalan tol Cisumdawu;
- 2) Memberikan rekomendasi penanggulangan dampak sosial ekonomi pembangunan jalan tol Cisumdawu.

1.3. KELUARAN (*OUTPUT*)

Keluaran yang diharapkan dari penelitian Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu ini secara umum mencakup analisis dan menyusun perencanaan penanggulangan dampak sosial ekonomi yang dapat diaplikasikan agar pembangunan jalan tol Cisumdawu mampu memberikan dampak positif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumedang.

1.4. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian tentang dampak sosial ekonomi pembangunan jalan tol Cisumdawu ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

- 1) Bagi kepentingan akademis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan informasi tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan wawasan keilmuan khususnya tentang dampak sosial ekonomi pembangunan jalan;

- 2) Bagi kepentingan praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan untuk merumuskan rencana penanggulangan dampak sosial ekonomi pembangunan jalan tol.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. KONSEPSI PEMBANGUNAN

Dewasa ini istilah pembangunan telah menjadi kata tunggal yang bermakna majemuk. Kata pembangunan dapat dipahami sekaligus sebagai kata kerja, kata benda dan kata sifat. Dilihat sebagai proses kegiatan yang berlanjut, pembangunan dapat dipandang sebagai kata kerja. Sebagai suatu sistem, proses kegiatan pembangunan itu berlangsung dalam suatu totalitas, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi. Setiap kegiatan dalam proses itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Apa yang direncanakan, itu yang akan dilaksanakan. Apa yang dilaksanakan, itu yang akan dievaluasi. Selanjutnya, temuan dari evaluasi menjadi masukan kembali dalam penyusunan rencana baru, begitu seterusnya. Meski proses kegiatan berlangsung secara berulang, namun tidak boleh bersifat rutin dan berjalan ditempat. Kondisi baru harus menjadi makin baik dan meningkat melalui identifikasi dan upaya untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang dijumpai pada setiap tahap dalam proses kegiatan.

Di lain pihak, tujuan pembangunan juga terlihat sebagai kata benda. Tujuan yang ingin dicapai itu dapat dilukiskan dengan angka-angka yang konkrit. Tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan lebih adil, kesempatan kerja yang bertambah banyak, jumlah produksi yang lebih meningkat, sarana transportasi dan komunikasi yang lebih baik dan lebih banyak, jumlah gedung sekolah yang makin bertambah, sarana kesehatan yang lebih banyak dan lebih bermutu, fasilitas produksi dan pemasaran yang lebih mudah serta mendorong kegiatan ekonomi rakyat dan usaha besar, dan sebagainya. Dengan demikian, rumusan tentang tujuan pembangunan harus terukur secara jelas, tidak boleh kabur dan

Perubahan sosial budaya terhadap masyarakat meliputi cara bagaimana mereka hidup, bekerja, bermain, berinteraksi satu sama lain, mengatur hidup untuk memenuhi kebutuhan mereka dan menyesuaikan diri sebagai bagian dari anggota masyarakat. Maka manfaat sosial adalah segala hal positif, segenap kemudahan yang didapatkan dari hal tersebut seperti kemudahan masyarakat dalam mengatur hidupnya, kemudahan bekerja dan mendapatkan pekerjaan, kemudahan memenuhi kebutuhan hidup dan sebagainya. Pada aspek kultural, manfaat sosial juga meliputi penguatan norma, nilai, kepercayaan yang memandu dan merasionalisasi pengetahuan mereka dan masyarakat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. OBJEK PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan ini adalah metode survei dengan pendekatan partisipatif, dimana setiap *stakeholders* dilibatkan sebagai objek kajian untuk memperoleh hasil analisis yang komprehensif. Wilayah kajian adalah daerah kecamatan yang akan terkena dampak pembangunan jalan tol, yaitu: 1) Jatinangor; 2) Tanjungsari; 3) Pamulihan; 4) Rancakalong; 5) Sumedang Selatan; dan 6) Sumedang Utara.

Pelaksanaan kegiatan perencanaan penanggulangan dampak sosial ekonomi pembangunan jalan tol Cisumdawu ini secara keseluruhan menggunakan 2 (dua) pendekatan utama, meliputi: (1) kajian terhadap literatur dan data sekunder yang menyangkut rencana pembangunan jalan tol Cisumdawu baik yang tersedia pada Bappeda, Pemda Kabupaten Sumedang, dan instansi terkait lainnya, serta (2) kajian empiris berdasarkan survey di daerah yang diprediksi akan terkena dampak dari pembangunan jalan tol tersebut. Kedua pendekatan tersebut di atas dipadukan dengan metoda analisis yang umum digunakan untuk menilai dampak dari suatu proses pembangunan.

3.2. KERANGKA PEMIKIRAN

Untuk memudahkan proses kegiatan perencanaan penanggulangan dampak sosial ekonomi pembangunan jalan tol Cisumdawu ini, maka disusun kerangka pemikiran dan alur proses pengkajian secara skematis sebagaimana gambar berikut ini.

akan fasilitas seperti perumahan, sekolah dan sarana rekreasi. Dampak psikologis dan sosial budaya meliputi integrasi sosial, kohesi sosial, keterkaitan dengan tempat tinggal.

Sebagaimana dampak sosial, ruang lingkup aspek manfaat sosial juga paling tidak mencakup aspek manfaat demografis, sosial ekonomi, psikologis, institusi dan sosial budaya. Manfaat demografis meliputi perubahan struktur penduduk, pemindahan dan relokasi penduduk. Manfaat sosial ekonomi terdiri dari perubahan pendapatan, kesempatan berusaha, dan pola tenaga kerja. Manfaat institusi meliputi bertumbuh kembangnya fasilitas seperti perumahan, sekolah dan sarana rekreasi. Dampak psikologis dan sosial budaya meliputi integrasi sosial, kohesi sosial, keterkaitan dengan tempat tinggal yang semakin tinggi.

Perubahan sosial budaya terhadap masyarakat meliputi cara bagaimana mereka hidup, bekerja, bermain, berinteraksi satu sama lain, mengatur hidup untuk memenuhi kebutuhan mereka dan menyesuaikan diri sebagai bagian dari anggota masyarakat. Maka manfaat sosial adalah segala hal positif, segenap kemudahan yang didapatkan dari hal tersebut seperti kemudahan masyarakat dalam mengatur hidupnya, kemudahan bekerja dan mendapatkan pekerjaan, kemudahan memenuhi kebutuhan hidup dan sebagainya. Pada aspek kultural, manfaat sosial juga meliputi penguatan norma, nilai, kepercayaan yang memandu dan merasionalisasi pengetahuan mereka dan masyarakat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

4.1.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Kabupaten Sumedang terletak antara 6°44'-70°83' Lintang Selatan dan 107°21'-108°21' Bujur Timur, dengan Luas Wilayah 152.220 Ha yang terdiri dari 26 kecamatan dengan 272 desa dan 7 kelurahan. Kabupaten Sumedang memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu

Sebelah Selatan : Kabupaten Garut

Sebelah Barat : Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang

Sebelah Timur : Kabupaten Majalengka

Kecamatan paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Buahdua dan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Cisarua. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN

Dari uraian hasil dan pembahasan sebagaimana disajikan pada bab 5, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Rencana pembangunan jalan tol Cisumdawu (Cileunyi–Sumedang–Dawuan) membutuhkan lahan dengan asumsi lebar ruang milik jalan (rumija) 60 m dan panjang 60, 11 km adalah : 360,66 Ha. Luas lahan yang akan dilewati jalan tol Cisumdawu sebagian besar berupa lahan tegalan/kebun /sawah dan hanya sebagian kecil yang merupakan lahan perkampungan/pemukiman. Rencana ini akan memberikan dampak baik dampak sosial maupun dampak ekonomi;
- 2) Dari aspek sosial, dampak yang timbul akibat pembangunan jalan tol ini antara lain berupa;
 - a. Ketidakpuasan masyarakat terhadap proses pembebasan tanah, terutama menyangkut harga ganti rugi kepada masyarakat yang tanahnya dijadikan lahan pembangunan jalan tol;
 - b. Konflik horisontal terjadi karena terjadinya sikap pro dan kontra di masyarakat terhadap rencana pembangunan;
 - c. Potensi munculnya persepsi negatif masyarakat terutama apabila kegiatan proyek menimbulkan dampak negatif terhadap aspek ekonomi, budaya, kesehatan dan lingkungan. Sikap/persepsi negatif yang berakumulasi dalam jangka waktu lama akan menimbulkan keresahan di masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik baik vertikal maupun horizontal.

- d. Akibat pembangunan jalan tol Cisumdawu diperkirakan 750 Ha lahan sawah juga hilang sehingga diperkirakan Kabupaten Sumedang akan kehilangan produksi padi sekitar 22.500 ton per tahun. Dalam hubungan ini masih terdapat faktor sosial dan budaya yang menghambat kaum perempuan petani dan kelompok rentan lainnya (lansia, janda, difabel, dan anak-anak) untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan.
- 3) Selain dampak sosial, rencana pembangunan jalan tol diperkirakan akan memberikan dampak ekonomi terutama bagi masyarakat yang secara langsung terkena dampak pembangunan jalan tersebut, seperti para pelaku usaha kecil menengah yang berada di sekitar jalur eksisting Jatinangor-Tomo. Di sepanjang jalur ini terdapat sentra-sentra perdagangan seperti di sekitar Jatinangor, Tanjungsari, Cigedel, Sumedang Kota, Paseh/Legok, Cimalaka, dan Tomo yang umumnya merupakan usaha mikro, kecil, menengah yang bergerak pada sektor usaha perdagangan dan jasa (warung, rumah makan, bengkel). Dampak ekonomi terhadap masyarakat di wilayah ini terutama diperkirakan oleh kemungkinan terjadinya volume usaha yang disebabkan oleh menurunnya volume kendaraan yang melewati jalur tersebut.

5.2. REKOMENDASI

Untuk menanggulangi dampak sosial yang mungkin akan terjadi, baik pada tahap pra-pelaksanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengoperasian jalan tol Cisumdawu, maka perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif guna mereduksi dampak khususnya dampak yang bersifat negatif. Beberapa langkah penanggulangan yang dapat dilakukan adalah:

- 1) **Rekayasa Sosial (Social Engineering).** Berbagai penolakan atau tuntutan terjadi karena masih kuatnya berbagai permasalahan sosial yang muncul. Diantaranya dampak dari berubahnya lingkungan fisik yang mengakibatkan dampak lanjutan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat yaitu terjadinya perubahan fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi pembangunan jalan yang menimbulkan dampak lanjutan terhadap perubahan mata pencaharian penduduk. Untuk itu, sebuah pedoman yang dapat dijadikan acuan untuk pengelolaan dan pemecahan masalah sosial yang timbul akibat kegiatan pembangunan jalan tol Cisumdawu perlu disusun dalam bentuk suatu rekayasa sosial.
- 2) **Pelibatan Masyarakat dalam Lapangan Pekerjaan (Temporer).** Tahapan kegiatan proyek pembangunan jalan Tol Cisumdawu yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap terbukanya kesempatan kerja dan usaha produktif bagi masyarakat adalah tahap pembangunan. Pada tahap ini terdapat kegiatan mobilisasi tenaga kerja yang membutuhkan sejumlah tenaga kerja baik tenaga kerja yang memiliki ketrampilan khusus maupun *unskilled*. Peluang kerja ini dapat diisi oleh penduduk yang tinggal di sekitar kegiatan pembangunan. Selain peluang kerja, kegiatan-kegiatan tersebut juga dapat menumbuhkan aktifitas usaha masyarakat baik formal maupun informal. Pendekatan pelibatan masyarakat melalui pendekatan berbasis komunitas berpotensi melahirkan dampak terhadap menguatnya

organisasi-organisasi social yang ada di masyarakat. Selain itu, kegiatan melalui pendekatan berbasis komunitas berpotensi melahirkan dampak terhadap menguatnya kearifan-kearifan lokal (*local wisdom*). Penguatan kearifan lokal ini dapat dilihat melalui proses kegiatan yang secara konsisten dilakukan melalui pertemuan-pertemuan atau rembuk-rembug warga, hal ini dapat mendorong menguatnya nilai-nilai kegotongroyongan, solidaritas sosial, kejujuran, keterbukaan, demokrasi dan penghormatan atas perbedaan pendapat dan pandangan, dll sebagai dasar bangunan kearifan lokal.

Dalam hal penanggulangan dampak ekonomi, hasil kajian ini merekomendasikan beberapa langkah perencanaan sebagai berikut:

- 1) Untuk menanggulangi dampak ekonomi, terutama yang disebabkan oleh menurunnya volume penjualan para pengusaha di sekitar jalur eksisting (Jatinangor-Tomo) dapat dilakukan dengan melakukan relokasi pengusaha ke daerah-daerah yang akan menjadi kawasan bisnis baru yaitu di sekitar rest area dan daerah-daerah yang menjadi *interchange* jalan tol Cisumdawu. Langkah ini dapat ditempuh dengan pendekatan pengembangan kawasan perdagangan baru atau pengembangan **aglomerasi kawasan perdagangan**.
- 2) **Peran Pemerintah Daerah.** Pemerintah daerah dan pengusaha adalah dua kelompok yang paling berpengaruh dalam menentukan corak pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah dalam mempertahankan keberlanjutan pembangunan ekonomi daerahnya agar membawa dampak yang menguntungkan bagi penduduk daerah perlu memahami bahwa manajemen pembangunan daerah dapat memberikan pengaruh yang baik guna mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang diharapkan. Bila

kebijakan manajemen pembangunan tidak tepat sasaran maka akan mengakibatkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Maka manajemen pembangunan daerah mempunyai potensi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi serta menciptakan peluang bisnis yang menguntungkan dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah. Prinsip-prinsip manajemen pembangunan yang pro-bisnis adalah antara lain sebagai berikut.

- a. **Menyediakan Informasi kepada Pengusaha.** Pemerintah daerah dapat memberikan informasi kepada para pelaku ekonomi di daerahnya ataupun di luar daerahnya kapan, dimana, dan apa saja jenis investasi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang akan datang.
- b. **Memberikan Kepastian dan Kejelasan Kebijakan.** Salah satu kendala berusaha adalah pola serta arah kebijakan publik yang berubah-ubah sedangkan pihak investor memerlukan ada kepastian mengenai arah serta tujuan kebijakan pemerintah.
- c. **Mendorong Sektor Jasa dan Perdagangan.** Sektor ekonomi yang umumnya berkembang cepat di kota-kota adalah sektor perdagangan kecil dan jasa. Sektor ini sangat tergantung pada jarak dan tingkat kepadatan penduduk. Persebaran penduduk yang berjauhan dan tingkat kepadatan penduduk yang rendah akan memperlemah sektor jasa dan perdagangan eceran, yang mengakibatkan peluang kerja berkurang. Semakin dekat penduduk, maka interaksi antar mereka akan mendorong kegiatan sektor jasa dan perdagangan. Seharusnya pedagang kecil mendapat tempat yang mudah untuk berusaha, karena telah membantu pemerintah daerah mengurangi pengangguran. Pada waktunya pengusaha kecil akan membayar

pajak kepada pemerintah daerah. Dengan menstimulir usaha jasa dan perdagangan eceran, pertukaran ekonomi yang lebih cepat dapat terjadi sehingga menghasilkan investasi yang lebih besar.

- d. **Meningkatkan Daya Saing Pengusaha Daerah.** Meningkatkan daya saing adalah dengan meningkatkan persaingan itu sendiri. Ini berarti perlakuan-perlakuan khusus harus ditinggalkan. Proteksi perlu ditiadakan segera ataupun bertahap. Pengembangan produk yang sukses adalah yang berorientasi pasar, ini berarti pemerintah daerah perlu mendorong pengusaha untuk selalu meningkatkan efisiensi teknis dan ekonomis.
- e. **Membentuk Ruang yang Mendorong Kegiatan Ekonomi.** Membentuk ruang khusus untuk kegiatan ekonomi akan lebih langsung menggerakkan kegiatan ekonomi. Pemerintah daerah perlu berusaha mengantisipasi kawasan-kawasan mana yang dapat ditumbuhkan menjadi pusat-pusat perekonomian wilayah. Kawasan-kawasan yang strategis dan cepat tumbuh ini dapat berupa kawasan yang sudah menunjukkan tanda-tanda aglomerasi, seperti sentra-sentra produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan; klaster industri, dan sebagainya.

KEPUSTAKAAN

- Abidin, Said Z., Kebijakan Publik, Jakarta, Yayasan Pancur Siwah, 2004
- Bryant, Coralie and Louise G. White, Managing Development in the Third World,
Boulder, Colorado: West View Press, 1982
- BPS Kabupaten Sumedang, Sumedang Dalam Angka, tahun 2008-2011
- Conyers, Diana and Peter Hills, An Introduction to Development Planning in The
Third World, New York: John Willey & Sons, 1984
- Katz, Saul M., A System Approach to Development Administration: A Framework
for Analysing capability of Action for National Development, Washington
D.C., 19..
- Lauer, Robert H., 3rd.ed., Perspectives on Social Change, Boston: Allyn and
Bacon, Inc. 1982
- Nafziger, E. Wayne, 2nd. Ed., The Economics of Developing Countries, NJ.,
Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1990.
- Swasono, Sri-Edi, Ekspose Ekonomi: Kompetensi dan Integritas Sarjana
Ekonomi, Jakarta, UI-Press, 2003
- Tjiptoherijanto, Prijono dan Said Zainal Abidin, Reformasi Administrasi dan
Pembangunan Nasional, Jakarta, L.P. Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia, 1993
- Tjokroamidjojo, Bintoro, Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, LAN, 2004